

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.

Dokumen Rencana Kerja ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari proses perencanaan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2026.

Kuala Tungkal, 30 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah



SUGIANTO, SE
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
 BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan

dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa "Rencana Kerja Tahun 2026".

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.

- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100 %, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 83,22 %
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tingkat realisasi Renja sebesar 139,71%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 11,40% dari target sebesar 8,16% tingkat realisasi renja sebesar 139,71% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SID TAHUN 2025

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT											
KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG G JAWAB
					TARGET RENJA TAHUN 2024 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2024 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02	KEUANGAN										BAPENDA KAB TANJAB BARAT
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pertersilaa Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	49.88 %	16.67 %	16.67 %	100.00%	16.67 %	83.22 %	83.22%	
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	23 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%	5 Dokumen	33 Dokumen	86.84%	
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	32 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	28 Dokumen	87.50%	
5.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	60 Laporan	83.33%	
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	5 Dokumen	83.33%	
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/bulan	142 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100.00%	60 Orang/bulan	247 Orang/bulan	72.88%	
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	5 Dokumen	83.33%	
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	10 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	- Dokumen	-	
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	36 Laporan	50.00%	
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	36 Laporan	50.00%	
5.02. 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	36 Laporan	50.00%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(8+7+9)	11=(10/4)	12
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawain Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33%	
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	8 Paket	80,00%	
5.02. 01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	50 Orang	0 Orang	- Orang	- Orang	-	- Orang	- Orang	-	
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	48 orang	4 orang	- orang	orang	-	- orang	4 orang	8,33%	
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	60 Laporan	83,33%	
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	5 Paket	63,33%	
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perakitan dan Perlengkapan Kantor	30 Paket	3 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00%	6 Paket	15 Paket	50,00%	
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	10 Paket	83,33%	
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	18 Paket	9 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	15 Paket	83,33%	
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	60 Dokumen	83,33%	
5.02. 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	60 Laporan	83,33%	
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50 %	16,67 %	16,67 %	100,00%	16,67 %	83,34 %	83,34%	
5.02. 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-	
5.02. 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 unit	1 unit	- unit	- unit	-	4 unit	5 unit	25,00%	
5.02. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	100 unit	11 unit	52 unit	52 unit	100,00%	20 unit	83 unit	83,00%	
5.02. 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	245 unit	65 unit	11 unit	11 unit	100,00%	20 unit	98 unit	39,16%	
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-	
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	60 Laporan	83,33%	
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	60 Laporan	83,33%	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+8)	11 = (10/4)	12
5.02.01.2.00.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	60 Laporan	83.33%	
5.02.01.2.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	60 Laporan	83.33%	
5.02.01.2.00.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160 %	49.31 %	16.87 %	8.41 %	90.48%	16.87 %	74.39 %	74.39%	
5.02.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100.00%	1 unit	5 unit	83.33%	
5.02.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262 unit	127 unit	40 unit	40 unit	100.00%	40 unit	212 unit	80.92%	
5.02.01.2.00.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	67 unit	0 unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-	
5.02.01.2.00.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	613 unit	368 unit	91 unit	91 unit	100.00%	85 unit	544 unit	88.74%	
5.02.01.2.00.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16 unit	7 unit	2 unit	2 unit	100.00%	3 unit	12 unit	75.00%	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	10.83 %	8.16 %	11.40 %	138.71%	8.18 %	8.18 %	100.00%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	135,485,344,900.00	125,916,259,679.73	111,948,600,000.00	141,786,284,028.34	126.04%	125,482,315,600.00	122,432,315,500.00	90.48%	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah	14 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	12 Dokumen	85.71%	
5.02.04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	14 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	13 Dokumen	92.86%	
5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Penyiapan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyiapan Kebijakan Pajak Daerah	47 Laporan	16 Laporan	10 Laporan	3 Laporan	30.00%	6 Laporan	25 Laporan	53.19%	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	6 Unit	85.71%	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan	33 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100.00%	11 Laporan	55 Laporan	83.33%	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 Laporan	13 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	4 Laporan	21 Laporan	84.00%	
5.02.04.2.01.07	Pertilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diusulkan NUP-nya	15,000 Objek Pajak	11,097 Objek Pajak	2,500 Objek Pajak	2506 Objek Pajak	117.44%	2,500 Objek Pajak	16,533 Objek Pajak	110.22%	
5.02.04.2.01.08	Pemilahan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	15 Dokumen	83.33%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	140 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	110.00%	60 Layanan	200 Layanan	83.13%	
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	8 Dokumen	40 Dokumen	83.33%	
5.02 04.2.01.11	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pajak Daerah	55 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%	10 Dokumen	50 Dokumen	90.91%	
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	180 Dokumen	69 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00%	30 Dokumen	134 Dokumen	83.75%	
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemertiksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	66 Dokumen	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100.00%	11 Dokumen	55 Dokumen	80.33%	
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	92 laporan	44 laporan	16 laporan	18 laporan	100.00%	16 laporan	78 laporan	82.61%	

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPING BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024 (thn n-2)	TAHUN 2025 (thn n-1)	TAHUN 2026 (thn n)	TAHUN 2024 (thn n-2)	TAHUN 2025 (thn n-1)	TAHUN 2026 (thn n)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		8.12	8.16	8.18	10.83					Realisasi capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan Trw IV Tahun 2024 sebesar 11,40% dari target 8,16%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	82	83	82.06					Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 82,06 dari target 81

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024 dan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 11,40% dari target 8,16% dengan tingkat realisasi sebesar 103,55% dan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target Renja sebesar 81 terealisasi sebesar 82,06

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Masih kurangnya fasilitas untuk mengembangkan upaya pemungutan pajak/retribusi daerah

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.
3. Kemajuan teknologi informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan di daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pendapatan Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Rancangan Awal RKPD				Heal Analysis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02	KEUANGAN				24,987,000,000	KEUANGAN				
5.02. 01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	17,984,000,000	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%	24,987,000,000
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	375,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	17,984,000,000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	175,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	375,000,000
5.02. 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	175,000,000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,745,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8,985,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	9,745,000,000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	1 Dokumen	475,000,000	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	1 Dokumen	8,985,000,000
5.02. 01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	475,000,000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	185,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	185,000,000
5.02. 01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.03.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	360,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	100,000,000
5.02. 01.2.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Berbasis Attribut Kepegawaian	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Attribut Kepegawaian	2 Paket	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Berbasis Attribut Kepegawaian	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Attribut Kepegawaian	2 Paket	360,000,000
5.02. 01.2.03.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	200,000,000
5.02. 01.2.03.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	80,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	100,000,000
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1,922,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	80,000,000
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1,922,500,000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	375,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	100,000,000

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.000.000			
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan	3 Paket	300.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan	3 Paket	300.000.000			
5.02. 01.2.06.03	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000			
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Barang Logistik dan Koordinasi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	12 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Barang Logistik dan Koordinasi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	12 Laporan	1.000.000.000			
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	100 %	1.828.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	100 %	1.828.000.000			
5.02. 01.2.07.01	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	225.000.000	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	225.000.000			
5.02. 01.2.07.02	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	1.200.000.000	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	1.200.000.000			
5.02. 01.2.07.03	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000			
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	12 Laporan	2.885.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	12 Laporan	2.885.000.000			
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000			
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	375.000.000			
5.02. 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.150.000.000			
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	100 %	1.381.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	100 %	1.381.600.000			
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekahi dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekahi dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	175.000.000			
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekahi dan dibayarkan Pajak dan Perakitannya	45 unit	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perakitan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekahi dan dibayarkan Pajak dan Perakitannya	45 unit	450.000.000			
5.02. 01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Dipekahi	15 unit	8.500.000	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Dipekahi	15 unit	8.500.000			
5.02. 01.2.09.04	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipekahi	85 unit	400.000.000	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipekahi	85 unit	400.000.000			
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan/Rahalisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekahi/Direhabilitasi	3 unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rahalisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekahi/Direhabilitasi	3 unit	350.000.000			
5.02. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENGAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	7.023.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENGAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.18 %	7.023.000.000			
5.02. 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	136.480.344.400.00	136.480.344.400.00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	136.480.344.400.00	136.480.344.400.00			
5.02. 04.2.01.01	Pencapaian pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	310.000.000	Pencapaian pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	310.000.000			

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebijakan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02 04.2.01.01	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	300.000.000
5.02 04.2.01.02	Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	623.000.000	Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	623.000.000
5.02 04.2.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengkajian Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengkajian Pajak Daerah	1 unit	550.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengkajian Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengkajian Pajak Daerah	1 unit	550.000.000
5.02 04.2.01.04	Pencetakan dan Penyaluran Objek Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pencetakan dan Penyaluran Objek Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000	Pencetakan dan Penyaluran Objek Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pencetakan dan Penyaluran Objek Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000
5.02 04.2.01.05	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000
5.02 04.2.01.06	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan	2500 Objek Pajak	780.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan	2500 Objek Pajak	780.000.000
5.02 04.2.01.07	Penerapan Wajib Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Ketersapan Pajak Daerah	3 Dokumen	775.000.000	Penerapan Wajib Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Ketersapan Pajak Daerah	3 Dokumen	775.000.000
5.02 04.2.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000
5.02 04.2.01.09	Pewilaitan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Tidak Akan Diverifikasi dan	8 Dokumen	520.000.000	Pewilaitan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Tidak Akan Diverifikasi dan	8 Dokumen	520.000.000
5.02 04.2.01.10	Pengalihan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	5 Dokumen	950.000.000	Pengalihan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	5 Dokumen	950.000.000
5.02 04.2.01.11	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	25 Dokumen	190.000.000	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	25 Dokumen	190.000.000
5.02 04.2.01.12	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	450.000.000	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	450.000.000
5.02 04.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengkajian Retribusi Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengkajian Retribusi Daerah	16 laporan	275.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengkajian Retribusi Daerah	BAPELDA Kab. Tegal Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengkajian Retribusi Daerah	16 laporan	275.000.000
			JUMLAH		24.987.000.000			JUMLAH		24.987.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja harus dilandasi dengan kebijakan nasional dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini sangat diperlukan agar program yang disusun oleh perangkat daerah tetap sesuai dengan kebutuhan daerah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL.
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2026
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,18 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

TABEL T.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Usuran/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2026				Cetakan Petares	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KELUANGAN				24,987,000,000	APBD			24,987,000,000
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			100%	17,984,000,000	APBD		100%	17,984,000,000
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	5 Dokumen	375,000,000	APBD		5 Dokumen	375,000,000
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4 Dokumen	175,000,000	APBD		4 Dokumen	175,000,000
5.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	200,000,000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	9,748,000,000	APBD		1 Dokumen	9,748,000,000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	62 Orang/ bulan	8,985,000,000	APBD		62 Orang/ bulan	8,985,000,000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	475,000,000	APBD		1 Dokumen	475,000,000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD		2 Dokumen	100,000,000	APBD		2 Dokumen	100,000,000
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (tutupan/Tridimensi/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Tridimensi/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tridimensi/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	185,000,000	APBD		12 Laporan	185,000,000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	100,000,000	APBD		12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.03.06	Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	100,000,000	APBD		12 Laporan	100,000,000
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepengawasan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	360,000,000	APBD		1 Dokumen	360,000,000
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Besar/ Akibat Kelangkaannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelangkaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	2 Paket	200,000,000	APBD		2 Paket	200,000,000
5.02. 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	10 Orang	100,000,000	APBD		10 Orang	100,000,000
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 orang	60,000,000	APBD		10 orang	60,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2020				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikator
5.02. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Urusan Perangkat Daerah	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	1,922,600,000	APBD			12 Laporan	1,922,600,000
5.02. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	1 Paket	100,000,000	APBD			1 Paket	100,000,000
5.02. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	6 Paket	375,000,000	APBD			6 Paket	375,000,000
5.02. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	2 Paket	130,000,000	APBD			2 Paket	130,000,000
5.02. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	3 Paket	300,000,000	APBD			3 Paket	300,000,000
5.02. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Dokumen	17,500,000	APBD			12 Dokumen	17,500,000
5.02. 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	1,000,000,000	APBD			12 Laporan	1,000,000,000
5.02. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	100 %	1,525,000,000	APBD			100 %	1,525,000,000
5.02. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	20 Unit	225,000,000	APBD			20 Unit	225,000,000
5.02. 01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	20 unit	1,200,000,000	APBD			20 unit	1,200,000,000
5.02. 01.2.07.07	Pengadaan Alat Tulis Lainnya	Jumlah Unit Alat Tulis Lainnya yang Disediakan		1 unit	100,000,000	APBD			1 unit	100,000,000
5.02. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	2,555,000,000	APBD			12 Laporan	2,555,000,000
5.02. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	30,000,000	APBD			12 Laporan	30,000,000
5.02. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	375,000,000	APBD			12 Laporan	375,000,000
5.02. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	2,150,000,000	APBD			12 Laporan	2,150,000,000
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	100 %	1,381,500,000	APBD			100 %	1,381,500,000
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibuyarkan Pakainya	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	1 unit	175,000,000	APBD			1 unit	175,000,000
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibuyarkan Pajak dan Perawatannya	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	45 unit	450,000,000	APBD			45 unit	450,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikasi/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikasi/
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Dipelihara	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	15 unit	6,500,000	APBD		15 unit	6,500,000
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	85 unit	400,000,000	APBD		85 unit	400,000,000
5.02. 01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	3 unit	350,000,000	APBD		3 unit	350,000,000
5.02. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	8.18 %	7,023,000,000	APBD		8.18 %	7,023,000,000
8.02. 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	136,480,344,600.00	7,023,000,000	APBD		136,480,344,600.00	7,023,000,000
8.02. 04.2.01.01	Pencananaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	2 Dokumen	310,000,000	APBD		2 Dokumen	310,000,000
5.02. 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
5.02. 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penysbarkasaan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penysbarkasaan Kebijakan Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	10 Laporan	623,000,000	APBD		10 Laporan	623,000,000
5.02. 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	1 unit	550,000,000	APBD		1 unit	550,000,000
5.02. 04.2.01.05	Pencatatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	11 Laporan	500,000,000	APBD		11 Laporan	500,000,000
5.02. 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	4 Laporan	650,000,000	APBD		4 Laporan	650,000,000
5.02. 04.2.01.07	Perbaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	2500 Objek Pajak	780,000,000	APBD		2500 Objek Pajak	780,000,000
5.02. 04.2.01.08	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	3 Dokumen	775,000,000	APBD		3 Dokumen	775,000,000
5.02. 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	60 Layanan	150,000,000	APBD		60 Layanan	150,000,000
5.02. 04.2.01.10	Penerbitan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitan dan Verifikasi	BAPEMDA Kab.Tanjab Barat	8 Dokumen	520,000,000	APBD		8 Dokumen	520,000,000

Kode	Ususan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02 04.2.01.11	Pemagham Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagham Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanyab Bant	5 Dokumen	950,000,000	APBD	5 Dokumen	950,000,000
5.02 04.2.01.12	Pelayanan Kibernetas Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kibernetas Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanyab Bant	25 Dokumen	190,000,000	APBD	25 Dokumen	190,000,000
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanyab Bant	11 Dokumen	450,000,000	APBD	11 Dokumen	450,000,000
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanyab Bant	16 laporan	275,000,000	APBD	16 laporan	275,000,000
		JUMLAH			24,987,000,000			24,987,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Pengelolaan pendapatan Daerah	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan usulan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, serta pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Dokumen ini juga diharapkan menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas dokumen di masa mendatang.

Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.

Kuala Tungkal, 30 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah



SUGIANTO, SE
Pembina Tk.I/IV.b
Nip.19670317 199002 1 001